

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia yang semakin modern menuntut tiap negara untuk dapat beradaptasi dengan kencangnya arus globalisasi. Menyempitnya ruang dan waktu akibat dari adanya globalisasi menyebabkan semakin mudahnya distribusi barang dari suatu tempat ke tempat yang lain. ASEAN sebagai asosiasi yang dibentuk untuk memperkuat integritas negara-negara di Asia Tenggara muncul sebagai sebuah solusi pengendali cepatnya arus globalisasi tersebut. ASEAN dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri, yaitu Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. ASEAN saat ini beranggotakan 10 negara anggota yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada awalnya, ASEAN dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan sejahtera. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi pada tahun 1960-an yang dihadapkan pada situasi rawan konflik (Setnas ASEAN, 2019).

ASEAN membentuk badan untuk berfokus kepada arus perkembangan perekonomian yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam mengontrol perekonomian di Kawasan Asia Tenggara. Dinamika hubungan antar negara negara dari hari ke hari terus berubah disikapi negara di Asia Tenggara yang tergabung ke dalam ASEAN dengan memperkuat integrasi antar negara. Kerjasama yang dibentuk biasanya terdiri dari berbagai bidang dan salah satu bidang yang menjadi fokus integrasi Asia Tenggara adalah bidang ekonomi

(cermati.com, 2017). Dalam penelitian kali ini, penulis akan berfokus kepada pengaruh MEA terhadap ekspor produk lokal khususnya di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Tahun 2015, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 ini terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling berhubungan, yaitu:

1. Ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh.
2. ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis.
3. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sectoral.
4. ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi pada masyarakat.
5. ASEAN yang mendunia.

Berdasar pada karakteristik di atas, MEA 2015 memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara yang lebih berkemajuan dengan Kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan memiliki daya saing yang tinggi (Kemlu, 2015). Diberlakukannya perjanjian tersebut menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman terhadap perekonomian Indonesia yang salah satunya adalah pemberlakuan liberalisasi pasar atau yang akrab kita sebut dengan perdagangan bebas dimana satu sisi pasar semakin luas di Kawasan Asia Tenggara, namun disisi lainnya Indonesia juga harus dapat bersaing dengan produk produk asing yang masuk ke Indonesia. Meskipun liberalisasi perdagangan ini sudah ada sejak terbentuknya *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tahun 1992, AFTA dianggap masih belum memiliki signifikansi yang cukup untuk pembangunan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara.

Fenomena perdagangan bebas di Asia Tenggara tentu menjadi misi penting pemerintah Indonesia untuk mendorong industri - industri produk lokal Indonesia untuk dapat bersaing di kawasan Asia Tenggara. Pembangunan ekonomi di Kawasan Asia Tenggara yang cenderung stagnan atau bahkan menurun pada tahun 2013 hingga 2015 di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Sebagai contoh adanya penurunan pada total ekspor Indonesia ke negara-negara anggota ASEAN yakni pada tahun 2013 nilai ekspor Indonesia ke ASEAN adalah 40.630 juta US\$. Tahun 2014 nilai ekspor Indonesia menurun menjadi 39.668 juta US\$ dan pada 2015 mengalami penurunan kembali dengan jumlah 33.557 juta US\$.

Adanya MEA saat ini juga masih menjadi pro-kontra bagi Indonesia terkait kesiapan Indonesia menghadapi MEA tersebut. Hal ini dikarenakan tujuan dari MEA yang ingin mengembangkan perekonomian negara maupun masyarakat ASEAN, masih sangat jarang untuk disosialisasikan kepada publik khususnya di Indonesia. Kurangnya pengetahuan produsen-produsen lokal di Indonesia yang menjadi kekhawatiran bahwasanya MEA hanya akan merugikan Indonesia dimana produk produk asing akan masuk ke Indonesia, sedangkan produk lokal hanya stagnan di pasar regional Indonesia dan tidak dapat memperluas pasarnya di negara negara ASEAN lainnya.

Melihat dari sudut pandang positif dari MEA, keuntungan yang bisa didapatkan Indonesia dengan adanya MEA diantaranya adalah semakin luasnya pasar ekspor serta mendorong peningkatan ekonomi masyarakat serta menstabilkan perekonomian negara. Adanya pasar yang liberal juga akan mendorong produk-produk lokal Indonesia dapat bersaing dengan produk asing sehingga akan terjadi peningkatan kualitas maupun kuantitas produk. Di lain sisi, pihak yang kontra terhadap kedatangan MEA ini berpendapat

bahwa Indonesia belum siap menghadapi MEA. Indonesia yang memiliki populasi terbanyak di antara anggota ASEAN lainnya, tentu akan dilirik sebagai pasar yang paling potensial bagi produk-produk asing. Besarnya jumlah produk asing yang masuk ke Indonesia dikhawatirkan akan mematikan produk lokal Indonesia yang tidak dapat bersaing. Hal ini bukannya mendorong perekonomian Indonesia namun malah menjadi kerugian bagi Indonesia yang hanya akan menjadi pasar bagi produk-produk asing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pendahuluan yang telah dipaparkan, maka adapun pertanyaan yang akan diajukan adalah **“Bagaimana pengaruh MEA terhadap ekspor produk lokal Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo?”**

C. Kerangka Teori

Neo-liberal Institutionalisme

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, teori yang cocok untuk mengkaji pertanyaan tersebut adalah teori neo-liberal institutionalisme. Teori neo-liberal institutionalisme muncul dengan latar belakang melengkapi dan mengkritik neo-realisme yang terlalu berfokus kepada konflik dan perang. Kaum neo-liberal institutionalisme percaya bahwasanya setiap penambahan materi suatu negara, maka itu adalah tambahan *power* bagi negara tersebut. Dengan begitu berarti adanya perkembangan perekonomian suatu negara dapat menjadikan negara tersebut memiliki *power* yang besar.

Kerjasama internasional menurut kaum neo-liberal Institutionalisme dapat tercipta dengan adanya 2 syarat, yaitu:

1. *Mutual interest*

Semakin tinggi kesamaan kepentingan suatu negara, maka semakin tinggi pula kemungkinan negara tersebut bekerja sama.

2. *Institusional degree*

Semakin banyak suatu negara tergabung ke dalam suatu institusi, maka semakin tinggi kesempatan negara tersebut untuk bekerja sama.

Secara sederhana, kaum neo-liberal institusionalisme meyakini bahwasanya kerjasama yang terbentuk antara suatu negara dengan negara yang lain disebabkan karena adanya interaksi yang intensif serta adanya kesamaan kepentingan yang belum terpenuhi antara negara tersebut (Jackson & Sorensen, 1999). Terjalinnnya Kerjasama antar suatu negara dengan negara yang lain berarti ada aktivitas timbal balik yang saling menguntungkan baik dengan saling melengkapi kebutuhan masing masing negara dan menyelesaikan masalah yang ada bersama-sama. Negara-negara dengan kesamaan kepentingan akan menciptakan pengaruh positif dimana negara-negara tersebut akan terintegrasi untuk mencapai kepentingan tersebut.

Sebagian besar argument mengenai neo-liberal institusionalisme berasal dari pemikiran Robert Keohane dalam bukunya yang berjudul *After Hegemony*. Robert Keohane beranggapan bahwa walau Kerjasama sulit untuk terwujud dan mudah untuk mengarah pada kekacauan, mereka akan mengarah pada proses dimana negara berusaha untuk menyesuaikan perilaku dan pilihan mereka melalui koordinasi kebijakan. Robert Keohane juga beranggapan bahwa dalam lingkungan yang penuh persaingan, negara berusaha untuk

memaksimalkan *absolute gains* melalui kerja sama. (Lamy, 2005)

Apabila kita lihat dari bagaimana negara negara di Asia tenggara membentuk ASEAN, dalam lingkungan yang penuh persaingan di Asia Tenggara, negara negara akan melakukan kerja sama demi mencapai kepentingan nasionalnya. Terlebih kondisi interdependensi di Asia Tenggara mendorong untuk terciptanya kerjasama di dalam sistem internasional. Dalam pandangan Neo-liberal Institusionalisme, kejahatan dan tingkah laku buruk merupakan produk dari institusi sosial yang korup dan kurang memadai, serta ketiadaan rasa saling memahami diantara para pemimpin. Oleh karena itu, melalui aksi kolektif seperti pembentukan ASEAN maupun kebijakan didalamnya, negara negara anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk menghapuskan kemungkinan terjadinya konflik didalamnya. Terjalannya kerja sama dengan adanya ASEAN menciptakan keuntungan timbal balik yang mana negara negara anggota ASEAN dengan tujuan yang sama bersama sama untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat ASEAN. Terdapat pula landasan pilar yang termuat dalam Cetak Biru yang disepakati dalam pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur pada tahun 2006 yang dibentuk untuk mendorong anggotanya dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yaitu:

1. Pasar dan basis produksi tunggal.
2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi.
3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
4. Kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global.

Teori Neo Liberal Institusionalisme juga berpendapat bahwa negara negara akan membentuk institusi kolektif untuk memperoleh kepentingan mereka sendiri, namun segera

sesudah institusi tersebut dibangun akan mengubah tingkah laku dengan menegakkan norma, berbagi informasi, dan mengurangi biaya transaksi. Hal tersebut dapat kita lihat pula dalam dibentuknya ASEAN, dimana pada awal dibentuknya Kerjasama perdagangan, negara negara cenderung hanya memikirkan bagaimana untuk mencapai kepentingan negaranya masing-masing, namun lambat laun, terjadi perubahan perilaku dimana mulai terbentuklah aturan yang harus dipatuhi tiap tiap negara sehingga terjadi integrasi yang lebih baik dan saling menguntungkan. (Yusran, Asnelly, & Elistania, 2017)

D. Hipotesa

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan kerangka teori yang sudah dipaparkan oleh penulis. Maka penulis menarik hipotesa pengaruh yang diberikan oleh Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap ekspor produk lokal Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo merupakan pengaruh positif sesuai dengan yang tertera pada landasan pilar dibentuknya MEA. Terjalannya suatu integrasi ekonomi dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari produk lokal Indonesia sehingga dapat bersaing di kawasan ASEAN.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan ini, penulis ingin meneliti pengaruh yang diberikan dari kemunculan MEA di Kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia terhadap ekspor produk lokal Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

F. Batas Penelitian

Pada penulisan ini agar pembahasan penelitian tidak keluar jalur pembahasan dari judul yang sudah dipaparkan, penulis akan berfokus pada pembahasan pengaruh MEA terhadap ekspor produk lokal khususnya di Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2016-2020.

G. Metodologi Penelitian

Pada penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisa pengaruh MEA terhadap ekspor produk lokal Indonesia pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Pendekatan kualitatif akan berfokus pada data yang didapat melalui penelitian perpustakaan. Data yang didapatkan merupakan data yang valid yang diperoleh melalui media cetak buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya baik dalam bentuk benda maupun elektronik.

H. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas kerangka utama dalam penyusunan penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori, hipotesa, dan metode penelitian.

Bab II: Sejarah berdirinya ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN

Bab ini akan membahas secara dalam terkait dengan sejarah dibentuknya ASEAN dan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Bab III: Pengaruh Positif MEA Terhadap Ekspor Produk Lokal Indonesia

Bab ini akan membahas tentang pengaruh yang diberikan MEA terhadap produk lokal Indonesia khususnya ekspor pada era Presiden Joko Widodo terkait dengan tujuan diadakannya MEA yang mana untuk meningkatkan perekonomian anggotanya.

Bab IV: Penutup

Bab ini akan menyimpulkan keseluruhan pembahasan pada seluruh bab.